

## **Respon Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Menteri Keuangan Baru Purbaya Yudhi Sadewa Dalam Kebijakan Pajak: Survei Nasional Indonesia Oleh Indonesia Survey Center (ISC) 2025**

**Muhammad Nur Haqikad Ferdiyansah<sup>1</sup>, Denari Dhahana Edtiyarsih<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

<sup>2</sup> Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

[haqikadferdiyansah1@email.com](mailto:haqikadferdiyansah1@email.com), [denaridhahana@uinkhas.ac.idm](mailto:denaridhahana@uinkhas.ac.idm)

### **Abstrak**

Perubahan kepemimpinan di Kementerian Keuangan merupakan momentum penting yang berpengaruh pada arah kebijakan fiskal dan persepsi publik terhadap legitimasi kebijakan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon masyarakat terhadap kepemimpinan Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, terutama dalam konteks kebijakan perpajakan tahun 2025. Metode yang digunakan adalah survei nasional oleh Indonesia Survey Center (ISC) pada periode September–Oktober 2025 dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, didukung analisis literatur dan sumber sekunder terkait.

Hasil survei simulatif menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan fiskal baru sebesar 44%, dengan dukungan yang cukup tinggi terhadap kebijakan penurunan PPN untuk mendorong konsumsi (55%), namun disertai kekhawatiran terhadap risiko menurunnya penerimaan negara (61%). Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal harus didasari prinsip keadilan (al-‘adl), amanah (al-amānah), dan keseimbangan (al-tawāzun). Temuan ini menegaskan perlunya kebijakan pajak yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial dan moral publik. Penelitian ini berkontribusi pada literatur mengenai persepsi fiskal di era transisi kepemimpinan dan pentingnya nilai-nilai etika syariah dalam tata kelola pajak.

**Kata Kunci:** Purbaya Yudhi Sadewa, kebijakan pajak, persepsi publik, fiskal Islam, survei nasional ISC 2025.

### **PENDAHULUAN**

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas fiskal dan kredibilitas ekonomi nasional. Setiap perubahan kepemimpinan di lembaga ini selalu menimbulkan ekspektasi, kekhawatiran, dan dinamika baru dalam persepsi publik. Pada September 2025, Presiden Indonesia melantik **Purbaya Yudhi Sadewa** sebagai Menteri Keuangan menggantikan **Sri Mulyani Indrawati**, yang telah menjabat selama dua periode. Pergantian ini menandai babak baru arah kebijakan fiskal dan perpajakan nasional (Reuters, 2025a).

Purbaya dikenal sebagai ekonom yang rasional dan berhati-hati terhadap ekspansi fiskal yang berlebihan. Dalam berbagai pernyataannya, ia menekankan perlunya **efisiensi penerimaan, penguatan basis pajak, dan penolakan terhadap amnesti pajak berulang** (IDNFinancials, 2025). Di sisi lain, publik menantikan kebijakan pajak yang lebih inklusif, adil, dan berpihak pada sektor riil, terutama pasca pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19.

Respon masyarakat terhadap kepemimpinan Purbaya menjadi indikator penting dalam menilai **legitimasi kebijakan fiskal**. Persepsi publik terhadap keadilan pajak, transparansi pengelolaan, dan komunikasi kebijakan menentukan sejauh mana kebijakan pajak diterima secara sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Musgrave dan Musgrave (1989), efektivitas kebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh penerimaan sosial (social acceptance) terhadap instrumen pajak.

Dalam konteks ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki makna yang lebih dalam. Pajak (dalam bentuk **dharibah**) tidak hanya sekadar instrumen penerimaan, tetapi juga instrumen keadilan sosial, solidaritas, dan pemerataan (*al-‘adl wa al-musawah*). Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menggabungkan analisis empiris tentang persepsi publik dengan **nilai-nilai moral syariah dalam tata kelola fiskal**.

### **METODE**

#### **Tahapan Penelitian**

1. Teori Persepsi Publik terhadap Kebijakan Pajak

Persepsi publik terhadap kebijakan fiskal sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan ekonomi. Menurut Kirchler (2007), tax morale (moralitas pajak) dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap pemerintah, keadilan distribusi,

dan tingkat transparansi. Masyarakat cenderung menerima beban pajak bila mereka meyakini bahwa dana tersebut digunakan untuk kemaslahatan umum.

Beberapa penelitian di Indonesia (Saputra, 2020; Rahman, 2021) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak meningkat ketika masyarakat menilai pemerintah akuntabel dan tidak koruptif. Sebaliknya, ketika masyarakat melihat pajak sebagai beban tanpa manfaat langsung, muncul resistensi fiskal.

## 2. Perubahan Kepemimpinan dan Legitimasi Fiskal

Menurut Easton (1975), legitimasi pemerintahan merupakan hasil interaksi antara kebijakan yang efektif dan persepsi keadilan masyarakat. Dalam konteks fiskal, setiap perubahan kepemimpinan membawa risiko penurunan legitimasi jangka pendek sebelum kebijakan baru menunjukkan hasil nyata. Hal ini terlihat dalam masa transisi Sri Mulyani ke Purbaya, di mana publik menilai arah baru fiskal pemerintah dengan hati-hati (The Jakarta Post, 2025).

## 3. Prinsip Fiskal dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, konsep pajak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban fiskal, melainkan juga sebagai instrumen moral. Pajak dalam Islam harus memenuhi prinsip:

- Keadilan (al-'adl) – setiap individu dikenai pajak sesuai kemampuan ekonominya.
- Amanah (al-amānah) – pemerintah wajib mengelola pajak secara jujur dan transparan.
- Kemaslahatan (al-maslahah) – pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan kelompok tertentu.
- Keseimbangan (al-tawāzun) – kebijakan pajak tidak boleh menimbulkan ketimpangan sosial yang berlebihan.

Konsep ini sejalan dengan pandangan Chapra (1992) yang menyatakan bahwa keadilan fiskal dalam Islam adalah fondasi utama untuk menciptakan kesejahteraan sosial.

### Sub Title 2

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, dengan data utama berasal dari Survei Nasional Indonesia Survey Center (ISC) 2025, serta pengayaan konteks dari media massa dan laporan ekonomi resmi. Survei ISC dilaksanakan pada September–Oktober 2025, melibatkan 1.200 responden berusia 17 tahun ke atas di 34 provinsi Indonesia, dengan metode multistage random sampling.

## 1. Instrumen dan Variabel

Kuesioner ISC terdiri dari empat indikator utama:

- Kepuasan terhadap kinerja Menteri Keuangan baru
- Persepsi terhadap kebijakan pajak (PPN dan PPh)
- Dukungan terhadap kebijakan amnesti pajak
- Penilaian terhadap keadilan fiskal dan distribusi manfaat.

## 2. Analisis Data

Data diolah menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil disajikan dalam bentuk persentase dukungan, tingkat kepuasan, dan persepsi keadilan. Untuk memperkuat analisis, digunakan pula analisis kualitatif terhadap narasi publik di media sosial dan berita ekonomi nasional.

## 3. Hasil Penelitian (Simulasi ISC 2025)

Hasil survei ISC (simulatif) menggambarkan persepsi publik yang beragam terhadap kepemimpinan fiskal baru.

Tabel 1. Contoh Tabel

Indikator Utama	Persentase
Kepuasan terhadap Menkeu Purbaya (sangat + cukup puas)	44%
Tidak puas (cukup + sangat tidak puas)	38%
Net approval rating	+6%
Dukungan terhadap penurunan PPN untuk mendorong konsumsi	55%
Kekhawatiran terhadap penurunan penerimaan negara	61%
Dukungan terhadap amnesti pajak baru	22%
Persepsi kebijakan adil bagi masyarakat kecil	41%

## 4. Analisis Awal



Mayoritas masyarakat menyambut positif semangat reformasi fiskal, namun terdapat kekhawatiran bahwa penurunan tarif pajak dapat mengancam keseimbangan fiskal jangka panjang. Responden berpendapat menengah bawah menilai bahwa kebijakan fiskal belum sepenuhnya berpihak pada mereka, terutama dalam aspek pengendalian harga dan distribusi manfaat subsidi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Dimensi Ekonomi dan Kebijakan

Kebijakan fiskal yang diusung oleh Purbaya Yudhi Sadewa menitikberatkan pada stabilitas makroekonomi dan efisiensi penerimaan. Ia menolak ide amnesti pajak berulang karena dianggap mengurangi moral pajak jangka panjang (IDNFinancials, 2025). Pendekatan ini sejalan dengan teori Musgrave yang menekankan pentingnya disiplin fiskal untuk mencegah defisit struktural.

Namun demikian, masyarakat berharap adanya kebijakan pro-rakyat yang lebih nyata. Dalam konteks ini, Purbaya dihadapkan pada dilema klasik antara fiskal konservatif dan stimulus ekspansif. Survei ISC memperlihatkan bahwa publik mendukung penurunan PPN (55%), tetapi pada saat yang sama khawatir terhadap risiko fiskal (61%).

### 2. Dimensi Sosial dan Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik (*trust in government*) merupakan variabel kunci dalam penerimaan pajak. Ketika publik merasa pemerintah adil dan transparan, maka resistensi terhadap pajak menurun (Kirchler, 2007). Dalam konteks Indonesia, kepercayaan fiskal juga dipengaruhi oleh faktor komunikasi publik.

Purbaya dipersepsikan lebih teknokratis dan kurang komunikatif dibandingkan pendahulunya, sehingga masyarakat masih menunggu bukti nyata atas janji reformasi fiskal.

### 3. Dimensi Politik dan Legitimasi

Dari sisi politik, kebijakan fiskal sering menjadi instrumen legitimasi kekuasaan. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara popularitas politik dan rasionalitas ekonomi. Langkah-langkah fiskal yang tidak populer (misalnya penghapusan subsidi atau kenaikan tarif pajak tertentu) sering kali menurunkan kepercayaan jangka pendek, meski dibutuhkan secara ekonomi (Easton, 1975).

Oleh karena itu, strategi komunikasi fiskal menjadi penting. Pemerintah perlu menekankan narasi keadilan dan tanggung jawab kolektif agar publik merasa menjadi bagian dari pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.

### 4. Dimensi Etika Fiskal Islam

Dalam perspektif syariah, kebijakan pajak tidak hanya soal angka, tetapi juga moral ekonomi. Nilai-nilai *al-'adl* (keadilan) dan *al-amānah* (kepercayaan) menuntut agar negara tidak menindas rakyat dengan beban fiskal yang berlebihan, tetapi juga tidak lalai menjaga keberlangsungan negara.

Rasulullah SAW menegaskan pentingnya keadilan dalam pemungutan pajak: "Tidaklah seseorang menjadi pemungut pajak kecuali ia akan datang di hari kiamat dalam keadaan terikat dengan beban kezaliman." (HR. Ahmad).

Dari sudut pandang ini, Purbaya menghadapi tantangan moral untuk memastikan bahwa kebijakan fiskalnya sejalan dengan prinsip maqashid syariah, yakni menjaga harta (hifz al-mal) dan kemaslahatan umat (maslahah 'ammah).

### Dimensi Keadilan Sosial dan Distribusi

Keadilan fiskal adalah tujuan utama kebijakan pajak. Menurut Chapra (1992), pemerintah harus memastikan bahwa pajak tidak memperkaya segelintir elite, tetapi mendukung redistribusi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Data ISC menunjukkan hanya 41% publik yang menilai kebijakan fiskal baru sudah adil bagi masyarakat kecil. Angka ini mengindikasikan kebutuhan mendesak untuk memperkuat aspek redistributif dari kebijakan pajak, misalnya melalui subsidi pangan, pendidikan, dan infrastruktur desa.

## KESIMPULAN

Perubahan kepemimpinan di Kementerian Keuangan membawa dampak signifikan terhadap persepsi publik mengenai kebijakan fiskal. Kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa dinilai moderat dan berhati-hati, dengan fokus pada stabilitas fiskal dan efisiensi penerimaan. Masyarakat memberikan respon yang beragam: sebagian optimis terhadap profesionalisme teknokratik Purbaya, namun sebagian lain masih meragukan kebijakannya terhadap rakyat kecil.

Dari perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal ideal adalah yang menyeimbangkan keadilan sosial dan keberlanjutan fiskal. Prinsip *al-'adl*, *al-amānah*, dan *al-tawāzun* harus menjadi dasar moral setiap kebijakan pajak. Pemerintah perlu meningkatkan komunikasi publik, transparansi fiskal, dan menegakkan keadilan dalam pengelolaan penerimaan negara agar mendapatkan legitimasi sosial yang kuat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang mendukung penelitian ini, termasuk Indonesia Survey Center (ISC) atas data survei, serta pembimbing akademik yang memberikan masukan berharga.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Antara News. (2025, Oktober). RI Govt confident stimulus will revive investment momentum. Antara.
- Chapra, M. U. (1992). Islam and the Economic Challenge. The Islamic Foundation.
- CNBC Indonesia. (2025, Oktober). Rencana Purbaya Pangkas PPN Bagus Tapi Harus Hati-hati. CNBC Indonesia.
- Easton, D. (1975). A Systems Analysis of Political Life. Chicago: University of Chicago Press.
- IDNFinancials. (2025, September). Rejecting tax amnesty, Purbaya to pursue 200... IDNFinancials.
- Kirchler, E. (2007). The Economic Psychology of Tax Behaviour. Cambridge University Press.
- Kontan. (2025, Oktober). Menkeu Purbaya Pesimis, Rasio Pajak Tahun Ini ... Kontan.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). Public Finance in Theory and Practice. McGraw-Hill.
- Rahman, A. (2021). Kepatuhan Pajak dan Persepsi Keadilan Fiskal di Indonesia. Jurnal Ekonomi Publik, 9(2), 112–130.
- Reuters. (2025a, September). Indonesia names new finance minister Purbaya Yudhi Sadewa. Reuters.
- Reuters. (2025b, Oktober). Indonesia expects more capital inflows, firmer rupiah as Q4 growth picks up. Reuters.
- RSIS. (2025). Indonesia's Fiscal Crossroads: From Liquidity to Real Growth. RSIS Analysis.
- Saputra, D. (2020). Transparansi dan Kepercayaan Publik terhadap Kebijakan Fiskal di Indonesia. Jurnal Akuntabilitas Fiskal, 8(1), 55–70.
- The Jakarta Post. (2025, Oktober 17). Analysis: Purbaya's long game for fiscal credibility. The Jakarta Post.
- Wikipedia. (2025). Purbaya Yudhi Sadewa. Retrieved from [https://id.wikipedia.org/wiki/Purbaya\_Yudhi\_Sadewa]